

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 16 MEI – 15 AGUSTUS 2023
(Masa Sidang Mulai Tanggal 16 Mei s.d. 13 Juli 2023
dan Masa Reses Mulai Tanggal 14 Juli 2023 – 15 Agustus 2023)**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 adalah sebagai berikut:

I. Kinerja Fungsi Legislasi

A. RUU USUL PEMERINTAH

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mulai melaksanakan Rapat untuk membahas materi DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE sebagaimana penugasan dari Raker tanggal 10 April 2023. Panja telah melaksanakan Rapat pada:

1. 24 Mei 2023 di Ruang Rapat Komisi I DPR RI.



2. 29 – 31 Mei 2023 di Hotel InterContinental Pondok Indah Jakarta Selatan.



3. 20-22 Juni 2023 di Hotel InterContinental Pondok Indah Jakarta Selatan.



4. 3 - 5 Juli 2023 di Ruang Rapat Komisi I DPR RI.



Disamping melaksanakan Rapat dalam rangka pembahasan materi DIM RUU, Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE juga telah melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE pada tanggal 9 – 11 Juni 2023 ke Provinsi:

1. Jawa Barat (Bandung)



2. Banten (Serang)



Dalam Kunjungan tersebut di atas Panja mendapatkan masukan dari Gubernur, Kapolda, dan Kajati. Masukan tersebut menjadi bahan bagi Panja dalam melaksanakan pembahasan materi DIM RUU dengan Tim Panja Pemerintah.

B. RUU USUL INISIATIF DPR RI

RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran)

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Panja Perumusan RUU Penyiaran Komisi I DPR RI masih melanjutkan penyusunan draft RUU Penyiaran. Panja akan menyampaikan hasil kerjanya kepada Komisi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Selanjutnya Komisi I DPR RI pada MP I TS 2023-2024 merencanakan akan menyampaikan draft RUU Penyiaran kepada Baleg untuk harmonisasi.

C. RUU KUMULATIF TERBUKA

1. RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*)

Pada tanggal 19 Juni 2023 dalam rangka mendapatkan masukan terhadap tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*), Komisi I DPR RI mengadakan RDPU dengan pakar yaitu:

- a. Dr. M. Imdadun Rahmat, M.Si (UI);
- b. Rizky Argama (Dir. Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia);
- c. Dr. (Cand.) Halili Hasan, MA (Direktur Eksekutif Setara Institute); dan
- d. Andy Yentriyani (Ketua Komnas Perempuan).



2. RUU tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir)

Pada tanggal 26 Juni 2023 Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDP dengan Dirjen Kerjasama Multilateral (KSM) Kemlu, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kemlu, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kumham, dan Dirjen Strahan Kemhan untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).



II. Kinerja Fungsi Anggaran

Berdasarkan penjadwalan Rapat Anggaran dari Badan Anggaran yang telah disampaikan kepada Komisi melalui Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor: B/4829/AG.01.01/4/2023 tanggal 11 April 2023 perihal Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka membahas:

1. Realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2022; dan
2. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2024.

pada tanggal 5 - 8 Juni 2023, yaitu:

- a. Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI
- b. Kementerian Luar Negeri (Kemlu);
- c. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) beserta KPI Pusat, KI Pusat, dan Dewan Pers
- d. Badan Intelijen Negara (BIN);
- e. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
- f. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
- g. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
- h. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas);
- i. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
- j. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI).

Setelah melaksanakan Raker dan RDP tersebut di atas, pada tanggal 8 Juni 2023 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Rapat Intern dalam rangka rekapitulasi hasil pembahasan:

1. realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN Mitra Kerja Komisi I DPR RI TA 2022; dan
 2. RKA dan RKP Mitra Kerja Komisi I DPR RI Tahun 2024
- Selanjutnya hasil rekapitulasi tersebut telah disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti.



III. Kinerja Fungsi Pengawasan

A. Panja Pengawasan Komisi I DPR RI

1. Panja Kebocoran Data

Pada MP V TS 2022-2023, Panja Kebocoran Data Komisi I DPR RI melanjutkan kerjanya dengan melaksanakan RDP dengan Sestama BSSN dan Dirjen Aptika Kemkominfo pada tanggal 12 Juni 2023 dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai:

- 1) Progress Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data;
- 2) Sinergitas Kemkominfo RI dan BSSN dalam Penguatan Keamanan Siber.



2. Panja BUMNIP

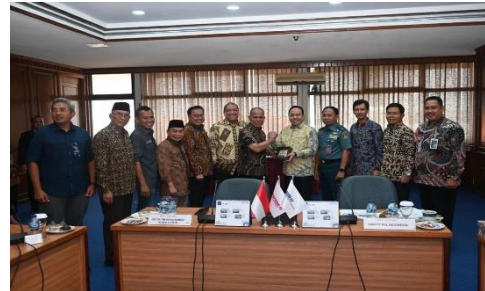
Pada MP V TS 2022-2023, Panja BUMNIP telah melaksanakan RDP dengan Dirjen Renhan Kemhan, Asrenum Panglima TNI, Asrena KASAD, Asrena KASAL, dan Asrena KASAU, Ketua Tim Pelaksana KKIP, Deputi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN pada 19 Juni 2023 dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai:

- 1) Kebijakan strategis Indhan yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan Indhan nasional;
- 2) Kinerja holding BUMN Indhan untuk kepentingan bangsa dan negara;
- 3) Urgensi revitalisasi Indhan menuju Indhan yang unggul dan yang berdaya saing;
- 4) Tinjauan Indhan dari sisi SWOT dan/atau SWOC; dan
- 5) Pendanaan untuk biaya investasi Indhan yang berdaya saing.



3. Kunker Panja pada 6 – 8 Juli 2023 ke:

a. Jawa Timur (Surabaya);



b. Jawa Timur (Malang).



dalam rangka mengetahui:

- 1) Hambatan-hambatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengganggu pengembangan industri pertahanan;
- 2) Transformasi bisnis dan peningkatan kinerja PT. PAL Indonesia dan PT. PINDAD mulai dari berdiri sampai dengan sekarang;
- 3) Realisasi program strategis PT. PAL Indonesia dan PT. PINDAD Indonesia tahun 2022;
- 4) Analisis SWOT PT. PAL Indonesia dan PT. PINDAD;
- 5) Rencana pengembangan PT. PAL Indonesia dan PT. PINDAD;
- 6) Kinerja keuangan PT. PAL Indonesia dan PT. PINDAD dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan perbaikan kondisi keuangan;
- 7) Pengelolaan aset PT. PAL Indonesia dan PT. PINDAD;
- 8) Urgensi revitalisasi PT. PAL Indonesia dan PT. PINDAD; dan
- 9) Dukungan yang dibutuhkan PT. PAL Indonesia dan PT. PINDAD.

B. Kunker Komisi I DPR RI

1. Kunker Spesifik

- a. tanggal 25 – 27 Mei 2023 dalam rangka mengetahui Peran Pemerintah Kota dan KPID Provinsi dalam Mengawal Informasi Pemilu yang Terpusat dan Terintegrasi ke:

- 1) Bali (Denpasar)



- 2) Sumatera Utara (Medan)



- 3) Jawa Timur (Surabaya)



b. tanggal 15 – 17 Juni 2023 dalam rangka:

- 1) mengetahui kesiapan Kodam II/Sriwijaya dan Kodam IV/Diponegoro dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024;
- 2) mengetahui peran LPP RRI Jawa Tengah dalam edukasi dan sosialisasi Pemilu 2024

ke:

- 1) Sumatera Selatan (Palembang)



- 2) Jawa Tengah (Semarang)



- 3) Jawa Tengah (Solo)



4. Kunker Reses

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah, pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 melakukan pengawasan pada tanggal 17 – 20 Juli 2023 ke :

- a. Sulawesi Selatan (Makassar) dalam rangka mengetahui Kesiapan Kodam XIV/Hasanuddin dalam Mendukung Pengamanan Pemilu 2024;



- b. Sumatera Utara (Medan) dalam rangka untuk mengetahui Upaya Binda Sumatera Utara terhadap Deteksi Dini dan Cegah Dini dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2024.



- c. Sulawesi Utara (Manado) dalam rangka mengetahui Peran LPP RRI dalam penguatan nilai budaya dan bangsa dalam konten siaran di era digital serta peran LPP RRI dalam edukasi, sosialisasi pemilu kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024.



5. Kunjungan Luar Negeri

Pada MP V TS 2022-2023, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunker ke:

- a. Austria (Wina) dalam rangka Pengawasan Komisi I DPR RI terhadap Mitra Kerja Komisi I DPR RI di luar negeri, yaitu Perwakilan RI di Luar Negeri terkait pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN serta pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan R.I. pada 22 – 28 Juli 2023;



- b. Republik Ceko, (Praha) pada 29 Juli – 4 Agustus 2023 dalam rangka memenuhi undangan dari KBRI Praha, Republik Ceko untuk membahas mengenai pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI terkait upaya dan langkah-langkah strategis perlindungan dan pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI) dan BHI di Ceko, kesejahteraan pegawai, infrastruktur diplomasi, anggaran, kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Republik Ceko dalam rangka penguatan hubungan bilateral dan lain-lain. Disamping itu juga untuk meninjau kondisi sarana prasarana KBRI Praha Republik Ceko seperti gedung, fasilitas pendukung pelayanan dan perlindungan WNI dan lain-lain.



6. Kegiatan lainnya

Disamping melaksanakan kegiatan tersebut di atas, Komisi I juga telah melaksanakan kegiatan lainnya, yaitu:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap calon Duta Besar Negara Sahabat untuk Indonesia dalam Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi DPR RI dengan Pemerintah.

Pada tanggal 12 Juli 2023, Komisi I DPR RI dalam Rapat Konsultasi telah memberikan pertimbangan terhadap Dubes Negara Sahabat untuk Indonesia, yaitu:

- 1) Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara;
- 2) Republik Angola;

- 3) Kerajaan Swedia;
- 4) Republik Islam Iran;
- 5) Republik Demokratik Rakyat Laos;
- 6) Republik Siprus;
- 7) Republik India;
- 8) Republik Argentina.

- b. Menerima kunjungan/Courtesy Call Dubes Negara Sahabat di Jakarta dan Delegasi Negara Sahabat sebagai berikut:
 - a. 5 Juni 2023 : pertemuan dengan Y.M. Kanasugi Kenji selaku Duta Besar Jepang Untuk Indonesia.
 - b. 14 Juli 2023 : pertemuan dengan H.E. Mr. Asad Majeed Khan selaku *Foreign Secretary/Deputy Foreign Minister, Ministry of Foreign Affairs of Islamic Republic of Pakistan.*

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.

Jakarta, 31 Juli 2023
KABAGSET. KOMISI I DPR RI,

SARTOMO, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001